

RESOLUSI KONFLIK ANTARETNIK DAN ANTARAGAMA: Perspektif Multikultural

Ali Imron A.M.

PBSID FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

Social conflict in Indonesia society recently often contain the political payload beside disappointment and feeling depressed. Some cause factor of incidence conflict of interethnics and interrelegion in Indonesia for example: (1) situated behind storey; level or collective grief of the communal group compared to by communal outhter group; (2) exactly group identity; (3) degree of cohesion and group mobilization; and (4) control represive by dominant group.

For the minimalisation and elimination social conflict, approach of represive or security is not precise. Approach approach multicultural can be wrong one alternative solution, with steps: (1) necessary it comprehension and acceptance multiculturalism realisticly; (2) mixings's steps and integrations all ethnics in societys's lifes; (3) management of various differences in indonesias's societys pluralistics be potensi in nations's developments; (4) abilitys's enhanceds to interprete and to communicate religions's teachings wisely; (5) the important attitudes example religions's leaders in interacted classly religions other.

Keywords: *conflicts interethnics and interrelegion, cause factors, solution, approach multicultural*

Pendahuluan

Suatu realitas yang tak terbantahkan, bahwa tidak satu negara pun di dunia yang memiliki identitas nasional yang tunggal. Tidak ada negara yang dihuni hanya oleh satu suku bangsa. Negara mana pun di dunia sekarang selalu didukung oleh pluralitas penduduk dari segi etnik. Implikasi dari pluralitas etnik ini adalah lahirnya pluralitas dalam aspek lain, seperti budaya, bahasa, agama, bahkan kelas sosial dalam satu negara. Lebih-lebih

Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar di Nusantara dan memiliki ratusan etnik.

Di sisi lain, karakteristik pluralitas Indonesia adalah kompleksitasnya di dalam hal etnik dan agama. Di Indonesia terdapat tidak hanya puluhan etnis, melainkan ratusan etnis dengan bahasa dan budayanya masing-masing yang satu dengan lainnya berbeda. Selain itu, berbagai etnik itu pada umumnya menganut agama masing-masing yang satu dengan

lainnya berbeda. Di Indonesia terdapat banyak agama yang diakui oleh negara yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Dan Kong Hu Cu (Kon Fu Tsio). Karena itu, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* terasa pas dengan kondisi bangsa Indonesia yang demikian majemuk dan heterogen.

Kebhinnekaan (baca: pluralitas dan heterogenitas) bangsa Indonesia itu tentu saja merupakan nilai positif tetapi sebenarnya sekaligus menyimpan nilai negatif yang terkadang tak terhindarkan. Dengan pluralitas komponen bangsa Indonesia itu, di satu sisi kita dapat menghimpun dan mengembangkan berbagai potensi bangsa yang ada. Pluralitas budaya yang ada di tanah air misalnya, merupakan kekayaan yang tiada tara dan harus disyukuri. Namun, di sisi lain pluralitas tradisi dan agama, mudah sekali menimbulkan gesekan antarberbagai kelompok komunal, yang pada gilirannya akan dapat memunculkan kekerasan sosial.

Lebih jauh, pluralitas bangsa Indonesia itu ternyata sangat rentan terhadap tindak kekerasan akibat konflik sosial terutama antar-etnik dan antar-agama, di samping antarkelas dan antar-golongan, yang dalam pembinaan politik di Indonesia pada zaman orde baru lazim disebut dengan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Kekerasan itu sejak lama telah muncul di beberapa daerah di Indonesia. Hanya saja selama ini kekerasan itu tidak besar atau membesar dan tidak merembar ke daerah lain. Namun, ketika bangsa Indonesia dilanda krisis moneter/ ekonomi sejak akhir 1997 yang kemudian melahirkan

gerakan reformasi —yang dimotori para mahasiswa dan intelektual—yang berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru dengan me-*lengseringkeprabon*-kan (menjatuhkan) Presiden Soeharto, kekerasan itu mengemuka bahkan menggejala di berbagai daerah. Sedikit saja ada gesekan, maka mudah sekali timbul kerusuhan massal dan tindak kekerasan kolektif (anarkisme), yang mengakibatkan rakyat yang tidak berdosa harus menderita karenanya. Kasus kerusuhan Tasikmalaya, Situ-bondo (1997); Medan, Jakarta, Solo, Ketapang dan Kupang (1998); Bali (1999), Ambon, Maluku Utara (1999/ 2000; 2003/ 2004), Mataram (2000), Kalimantan (2004), Jakarta (2005), dan Poso (2003-2006) merupakan contoh aktual yang masih segar dalam ingatan kita. Dan, sekaligus mengindikasikan betapa kekerasan sosial akhir-akhir ini begitu fenomenal melanda masyarakat kita. Padahal masyarakat kita dulu dikenal bersifat religius dan berbudaya santun: halus budi bahasanya, berbudi pekerti luhur, ramah-tamah perangnya, suka kerukunan dan perdamaian. Kita tentu masih ingat akan pepatah dalam budaya masyarakat Jawa “*Rukun agawe santosa lan congkrah agawe bubrah*” (rukun/ damai membuat kita menjadi kuat dan bersengketa membuat kita menjadi rusak/ lemah).

Sayang sekali bahwa karakteristik bangsa Indonesia yang religius itu kini (mungkin) tinggal menjadi kenangan. Identitas “bangsa religius dan berbudaya santun” itu telah terkoyak dan ternodai oleh berbagai tindak kekerasan sosial dan anarkisme di

berbagai daerah. Bahkan konflik di Ambon antara komunitas Kristen dengan komunitas Islam baru mereda pada tahun 2004 setelah meletus konflik sejak 1999. Namun, bukan tidak mungkin hingga kini masih ada “bara konflik” di sana yang setiap saat dapat saja meledak jika ada ‘angin’ yang meniupnya. Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan dan kegelisahan di kalangan masyarakat Indonesia, lebih-lebih ketika kita sedang berjuang mengatasi kesulitan hidup akibat krisis yang berkepanjangan sejak 1997 baik krisis ekonomi, politik, maupun moral. Kini kondisi yang cukup sulit itu bahkan diperberat lagi dengan adanya bencana alam bertubi-tubi yang melanda masyarakat Indonesia dari badai Tsunami di Aceh (Desember 2004), gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah (Mei 2006), letusan gunung berapi Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta (Juli 2006), semburan lumpur Lapindo di Sidoharjo Jawa Timur (Agustus 2006), banjir bandang di Jakarta dan beberapa daerah lain (Februari 2007), badai angin puting beliung di Demak Jawa Tengah (Februari 2007), dan tanah longsor di beberapa daerah.

Permasalahannya adalah faktor-faktor apa yang memicu munculnya konflik antaretnik dan antaragama? Bagaimana kita memanej keberbedaan latar belakang bangsa Indonesia itu menjadi potensi? Lalu, bagaimana model-model solusi alternatif untuk mengeliminasi konflik antaretnik dan antaragama dengan pendekatan multikultural?

Tulisan ini tidak berpretensi untuk membahas konflik antaretnik

dan antaragama beserta solusinya secara mendetail. Mengingat berbagai keterbatasan, maka tulisan ini baru merupakan kajian sekilas terhadap berbagai permasalahan yang dilakukan dengan pendekatan multikultural. Tentu saja masih diperlukan kajian lanjut dan dialog panjang secara intens.

Konflik dan Komponennya

Seperti halnya istilah lain, pengertian konflik beraneka ragam yang dikemukakan para pakar. Umumnya, perbedaan pengertian itu muncul sebagai akibat adanya perbedaan fokus atau penekanan. Coser (1956) misalnya, menekankan aspek perilaku konflik. Fokus terhadap perilaku konflik itu sangat populer di kalangan peneliti konflik dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan Boulding (1962) lebih memfokuskan pada situasi yang melatari konflik, seperti persaingan dan ketidakselarasan (*incompatibility*). Lain lagi dengan definisi Kriesberg (1982) yang lebih menekankan pada keyakinan (*belief*) dengan anggapan bahwa konflik terjadi jika pihak-pihak meyakini tujuan mereka bertentangan satu dengan lainnya. Adapun Pruitt dan Rubin (1986) menekankan pada persepsi dan keyakinan mengenai ketidakselarasan kepentingan (seperti nilai dan kebutuhan) dan aspirasi (tujuan dan tolok ukur) (dalam Panggabean, 1998: 9).

Beberapa definisi sekitar konflik di atas perlu diperhatikan mengingat masing-masing definisi itu menekankan dimensi tertentu dalam konflik. Dari empat definisi konflik di atas tercakup tiga komponen pokok konflik

yang dapat dicermati, yakni: (1) Kondisi yang mendahului konflik, (2) Perilaku konflik, dan (3) Aspek-aspek kognitif dan afektif konflik.

Ketiga komponen utama konflik tersebut selanjutnya juga penting diperhatikan dalam kerangka menganalisis konflik. Dalam arti ketika kita menganalisis fenomena atau peristiwa konflik tertentu, dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan misalnya:

- (1) Situasi apa yang melatari suatu konflik? Bagaimana situasi tersebut terbentuk di dalam masyarakat? Isu apa saja atau pokok persoalan apa yang menjadi sengketa?
- (2) Sikap dan persepsi apa yang dimiliki pihak-pihak yang berkonflik sehubungan dengan sehubungan dengan lawan? Bagaimana sikap dan persepsi itu terbentuk dan bertahan?
- (3) Perilaku konflik apa saja yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang bertikai? Lalu, strategi, taktik, atau alat apa yang digunakan dalam perilaku konflik? (Panggabean, 1998: 8).

Berdasarkan ketiga komponen konflik di atas, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konflik. Pemahaman konflik tidak hanya menekankan pada satu komponen saja khususnya komponen perilaku sehingga komponen lain kurang memperoleh perhatian semestinya. Karena itu, beberapa pertanyaan semacam dapat diajukan untuk keperluan analisis konflik, mulai dari konflik antarpribadi sampai internasional, antara lain: Apa sumber kon-

flik?; Siapa pihak-pihak yang terlibat?; Apa pokok sengketa dan issue konflik?; Apa taktik yang dipakai pihak-pihak yang berkonflik?; Apa yang berubah dalam konflik seiring dengan waktu?; Bagaimana konflik meluas sehingga melibatkan lebih banyak pihak, wilayah, dan issue konflik?; Apa saja peran pihak-pihak lain (seperti patron, penengah, sekutu, audiens, penonton) dalam konflik?; Apa hasil dan akibat yang ditimbulkan konflik?

Adapun bentuk-bentuk perilaku konflik dapat berupa demonstrasi, kerusuhan komunal, kekerasan sosial, kerusuhan politik, pemogokan massal, dan lain-lain.

Akar Munculnya Konflik

Untuk memahami sebab-sebab munculnya konflik, lebih dulu perlu dikemukakan teorisasi tentang *Ethno-nationalism* (dalam P3PK-UGM dan Departemen Agama, 1997: 11). Para pendukung *Ethno-nationalism* terbagi dalam dua aliran. *Pertama*, para etnonasionalis yang beraliran “primordialis” mengemukakan argumen bahwa banyak gerakan politik — termasuk perilaku konflik— berbasis suku yang menekankan nasionalisme etnik. Ini merupakan manifestasi dari tradisi kultural yang masih bertahan yang didasarkan pada perasaan identitas etnik primordial. Dengan demikian, motivasi utama perilaku konflik mereka adalah memelihara identitas kultural itu, sesuatu yang immaterial. *Kedua*, para teoritis etnonasionalis yang beraliran “instrumentalis” memahami issue etnisitas itu sekadar sebagai *an exercise in boundary maintenance*, dan berasumsi

bahwa gerakan komunal merupakan respons terhadap perlakuan pilih-kasih. Jadi, mereka melakukan gerakan dengan menggunakan simbol-simbol etnik dengan tujuan memberi tanggapan terhadap perlakuan yang tidak adil dari pihak lain; yang mungkin saja bersifat material. Penggunaan simbol-simbol etnik itu didasarkan pada alasan praktis yakni sarana efektif untuk menimbulkan dukungan emosional.

Adapun Charles Tilly (1978) menyatakan, bahwa tindak kekerasan merupakan hasil kalkulasi para pemimpin yang memobilisasikan sumber daya kelompok untuk menanggapi peluang politik yang berubah. Kekerasan dan perilaku konflik itu terjadi bukan karena ekspresi emosional masyarakat tetapi merupakan tindakan rasional atau tindakan instrumental untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Pendeknya, tindak kekerasan dan perilaku konflik adalah hasil kalkulasi politik (dalam P3PK-UGM dan Departemen Agama, 1997: 14).

Pandangan-pandangan mengenai penyebab tindak kekerasan di atas, dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok teoritis yang berpandangan bahwa tindak kekerasan dan perilaku konflik merupakan reaksi emosional terhadap gangguan dari luar. *Kedua*, kelompok pendukung instrumental yang berpendapat bahwa tindak kekerasan dan/ atau perilaku konflik merupakan hasil dari kalkulasi strategis dan keputusan taktis (para pemimpin/ elit politik). Meminjam istilah Susetyawan (1999: 5), bahwa “kerusuhan marak akibat pertentangan elit politik”. Namun,

pada prinsipnya, kedua pendapat di atas dalam praktiknya berhubungan erat.

Penelitian mengenai berbagai kelompok etnik dan komunal yang aktif dalam gerakan politik menunjukkan, bahwa mobilisasi dan strategi mereka didasarkan pada interaksi antara kedua faktor itu. “Kekecewaan akibat perlakuan pilih-kasih dan perasaan identitas kelompok merupakan landasan dasar bagi mobilisasi dan menentukan jenis tuntutan yang dapat diajukan para pemimpin gerakan” (Gurr, dalam P3PK-UGM dan Departemen Agama, 1997: 12). Jika kekecewaan masyarakat tidak cukup parah dan identitas kelompok tidak cukup kuat, maka para pemimpin itu tidak memiliki bahan atau sarana untuk menanggapi ancaman atau peluang yang datang dari luar kelompok. Sebaliknya, jika kekecewaan itu mendalam dan meluas, diimbangi dengan identitas dan kepentingan kelompok yang kuat, maka tersedianya “massa frustrasi” yang cukup; tinggal menunggu kesempatan untuk membuatnya marah besar.

Sejalan dengan pemikiran di atas, kekecewaan hanya akan menimbulkan tindak kekerasan pada aras komunitas jika dilakukan mobilisasi atas konflik yang terjadi. Mobilisasi itu dapat berupa mendorong anggota kelompok atau masyarakat lainnya agar bersedia mengorbankan tenaga dan sumberdaya untuk melakukan tindakan kolektif demi kepentingan bersama.

Bagaimana dengan fenomena pemicu? Kondisi psikologis tidak secara langsung mengakibatkan timbulnya perilaku kekerasan kolektif. Hubungan

itu dikualifikasi oleh adanya kejadian yang berfungsi sebagai pemicu. Pendeknya, massa yang kecewa berat itu perlu pemicu. Selanjutnya, karena pemicu itu tidak dapat diasumsikan sebagai kejadian yang sekali-jadi, tetapi mungkin terjadi sebagai reIntetan peristiwa, maka untuk dapat menggugah perhatian massa, pemicu itu perlu dimobilisasi.

Hingga di sini kita dapat memahami bahwa tindakan kekerasan kolektif itu berkaitan dengan kondisi psikologis, berujud kekecewaan masyarakat yang meluas, yang diletupkan oleh kejadian pemicu.

Dalam konteks ini, Gurr (dalam P3PK-UGM dan Departemen Agama, 1997: 12), mengemukakan empat faktor yang dipandanginya menentukan intensitas kekecewaan dan potensi untuk melakukan tindakan politik sebagai jalan keluarnya.

Pertama, seberapa jauh tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif kelompok komunal tersebut dibanding dengan kelompok-kelompok lain. Semakin besar perbedaan kondisi antarkelompok itu semakin kuat alasan untuk kecewa dan semakin kokoh persepsi bahwa mereka memiliki kepetingan bersama untuk melakukan tindakan kolektif.

Kedua, ketegasan identitas kelompok. Kekecewaan kelompok dan potensi untuk mengartikulasikan kekecewaan itu secara politik bergantung pada kekuatan (*silence*) identitas kelompok itu. Identitas kelompok biasanya sangat mencolok pada masyarakat komunal yang merasa terancam.

Ketiga, derajat kohesi dan mobilitasi kelompok. Kohesi kelompok terjamin jika ada jaringan komunikasi dan interaksi yang padat. Kohesi itu merosot jika kelompok itu terpecah dalam beberapa gerakan dan organisasi politik.

Keempat, kontrol represif oleh kelompok-kelompok dominan. Daya paksa yang diterapkan dengan tidak adil mendorong munculnya kemarahan dan sikap selalu curiga.

Melengkapi pendapat di atas, Blau (dalam P3PK-UGM dan Departemen Agama, 1997: 14) mengemukakan struktur pemilahan sosial (*social cleavages*) dalam masyarakat digambarkan dalam pemilahan sosial berdasarkan parameter agama, ras, suku, dan kelas sosial. Masyarakat diasumsikan dapat mengembangkan konfigurasi pemilahan sosial yang bersifat *consolidated* atau *intersected*. *Consolidated* artinya pemilahan sosial yang terjadi membuat warga masyarakat dari suku A umumnya beragama X, dan memperoleh nafkah dari mata pencaharian perdagangan. Warga dari suku B umumnya beribadat menurut agama Y dan bekerja sebagai petani; sedangkan kelompok C umumnya beragama Z dan banyak yang menduduki jabatan birokrasi-pemerintahan.

Adapun konfigurasi *intersected* adalah pemilahan-sosial itu memungkinkan warga masyarakat berbagai suku memeluk agama yang berbeda serta aktif mencari nafkah dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam konfigurasi pertama, pemilahan yang eksklusif membuat hubungan antar-suku dengan mudah berubah menjadi

antaragama dan antarkelas. Dalam konfigurasi kedua, pemilahan sosial itu memungkinkan pembauran warga masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan: suku, agama, dan kelas sosial.

Berangkat dari uraian di atas, mudah dipahami bahwa kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mengalami pemilahan sosial secara *consolidated* cenderung mengembangkan identitas kelompok yang kuat dan lebih mudah menciptakan kohesi kelompok yang kokoh. Dalam kelompok seperti ini, kesadaran konflik cenderung tinggi. Sebaliknya dalam masyarakat *intersected* kesadaran konflik itu lebih sulit dikembangkan, sehingga intensitas konflik cenderung rendah. Pada gilirannya, kondisi struktural itu berkaitan dengan kondisi psikologis masyarakat. Individu-individu dalam masyarakat dengan konfigurasi pemilahan sosial yang *consolidated* cenderung lebih mudah melakukan "subjektivikasi konflik" ketimbang warga masyarakat dengan konfigurasi yang *intersected*. Para anggota masyarakat dengan intensitas konflik tinggi cenderung lebih mudah menerjemahkan konflik yang menyangkut kondisi objektif (konflik objektif) menjadi konflik yang menyangkut pribadi (konflik subjektif). Misalnya, konflik mengenai persoalan ekonomi berkembang menjadi konflik mengenai agama (kasus kerusuhan Timor Timur, 1996 dan kasus kerusuhan sosial etnis Madura dengan etnis Dayak di Kalimantan, 2004).

Selanjutnya akan dikemukakan peran agama sebagai variabel independen dari tindak kekerasan kolektif,

mengingat akhir-akhir ini banyak kerusuhan di Indonesia diwarnai atau melibatkan simbol-simbol keagamaan. Minimal ada dua alasan mengapa dimensi agama perlu ditekankan dalam pembahasan mengenai kerusuhan ataupun konflik sosial terlebih di Indonesia yang masyarakatnya memiliki karakteristik yang spesifik dari segi agama.

Pertama, adanya indikasi bahwa modernisasi sosial-ekonomi di berbagai tempat yang berpenduduk mayoritas Muslim, justru mendorong peningkatan religiositas, bukan sekularisme. Walaupun peningkatan religiositas juga tercatat di kalangan pemeluk agama lain, namun yang terjadi pada umat Islam sangat mencolok. Persoalannya adalah bahwa proses itu ternyata memuat potensi yang dapat mengganggu keselarasan dalam hubungan antarumat beragama. Dalam masyarakat seperti itu, misalnya, militansi cenderung meningkat, fundamentalisme berkembang, toleransi antarpemeluk agama menurun.

Kedua, adanya dugaan bahwa proses yang sama menghasilkan pengenduran hubungan antara sebagian pemeluk agama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang melayaninya. Kemerosotan lembaga-lembaga otorita lembaga agama semakin terasa di berbagai kalangan umat beragama. Otoritas para pemimpin lembaga agama terhadap umat yang mengalami modernisasi-urbanisasi, terutama lapisan usia muda, terasa mengendur. Di beberapa tempat di Jawa *demonstration effect* yang diakibatkan oleh proses moderni-

sasi membuat hubungan para kyai dengan santri atau pengikutnya tidak seerat dulu. Hubungan antara santri dengan ulama, dalam pandangan pengikutnya sudah dikooptasi (*coopted*) oleh negara. Hal yang sama juga terjadi di kalangan agama lain. Di dalam umat Kristiani hubungan antara jemaat dengan para pemimpin lembaga agamanya mengalami perubahan ke arah yang semakin merenggang. Kohesi yang merosot di kalangan umat beragama ini dikhawatirkan akan membuat pengendalian konflik antarumat beragama semakin sulit dilakukan (kasus kerusuhan Ambon dan Poso, misalnya).

Di sisi lain kebijakan pembangunan yang berwujud dorongan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara cepat menurut jalan kapitalis (“akumulasi kapital”) dengan dukungan mekanisme administrasi publik dan kekuasaan negara (*state-building*) telah menimbulkan berbagai dampak, beberapa di antaranya bersifat negatif. Salah satunya adalah perubahan konfigurasi pemilahan sosial. Hubungan antara proses akumulasi kapital dengan konfigurasi pemilahan sosial itu diperumit oleh perubahan demografik yang juga terjadi akibat antara lain akumulasi kapital itu.

Tegasnya, perubahan komposisi etnik atau perubahan jumlah warga masing-masing etnik dalam suatu wilayah, yang bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah perubahan demografis akibat program KB. Di wilayah tertentu yang memiliki daya tarik ekonomi kuat terjadi migrasi.

Kaum pendatang umumnya lebih intensif dalam memanfaatkan akumulasi kapital. Akibatnya, ketimpangan ekonomi dapat memperburuk konfigurasi pemilahan sosial ke arah penguatan konsolidasi identitas etnik masing-masing kelompok (kasus Timor Timur, 1996 dan kasus kerusuhan sosial etnik Madura dengan etnik Dayak di Kalimantan, 2004).

Proses pembangunan nasional juga mempengaruhi kondisi religio-sitas warga masyarakat. Pengaruh itu dapat datang secara langsung melalui kebijakan pemerintah yang memang dirancang untuk menggalakkan kehidupan beragama (misal, via pendidikan) dan tak langsung (fasilitas peribadatan). Baik langsung maupun tak langsung, proses pembangunan telah menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan religio-sitas masyarakat. Namun proses yang sama ternyata juga menumbuhkan militansi yang berlebihan. Proses pendidikan agama yang lebih menekankan upaya menegaskan keistimewaan identitas kelompok sendiri, diduga mendorong militansi itu.

Proses sosial yang berlangsung bersamaan dengan dinamika perubahan ekonomi juga cenderung menghasilkan fenomena yang sama. Keberhasilan ekonomi suatu kelompok umat beragama menimbulkan keyakinan yang lebih besar akan kebenaran kelompoknya dan karenanya cenderung merendahkan kelompok lain, atau sebaliknya menimbulkan kecemburuan sosial bagi kelompok umat beragama yang lain. Di beberapa tempat peningkatan militansi ini juga memengaruhi terjadinya perubahan

konfigurasi pemilahan sosial dari yang semula *intersected* menjadi *consolidated*.

Begitulah, dampak negatif dari proses pembangunan telah mendorong perubahan konfigurasi pemilahan sosial yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kesadaran konflik dan perluasan frustrasi di kalangan masyarakat. Masyarakat yangarganya mengalami kondisi psikologis seperti itulah yang menyediakan “kain berminyak”. Namun, kondisi itu tidak akan menimbulkan konflik yang membakar jika tidak ada percikan api. Dan, percikan api itu tidak akan menimbulkan kobaran konflik yang membesar jika tidak dikobarkan melalui upaya mobilisasi kesadaran konflik. Hubungan antara variabel frustrasi masyarakat dengan variabel kesadaran konflik, pemicu dan mobilitas konflik itu saling mempengaruhi; dan dinamika pada tingkat inilah yang menentukan apakah berbagai variabel tadi akan betul-betul menimbulkan perilaku konflik berupa kerusuhan dan anarkisme.

Jika kita cermati, maka berbagai konflik yang terjadi di Indonesia terutama konflik antar-etnis dan antar-agama lebih disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya kompleks. Meminjam teori etno-nasionalis mungkin bermula dari konfigurasi *intersected* kemudian berubah menjadi *consolidated* yang membuka kesadaran konflik dan kemudian memungkinkan terjadinya kekerasan kolektif. Hal itu diperparah oleh adanya kenyataan pahit yang membuat masyarakat Indonesia tertekan selama lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru (1966-1998) yang represif.

Dari kacamata budaya politik kita melihat bahwa berbagai tindak kerusuhan dan tindakan anarkis yang muncul dalam masyarakat setidaknya akhir-akhir ini justru telah disemangati oleh api reformasi yang diterjemahkan secara membabi buta. Jadi, terjadi salah interpretasi atau destorsi makna reformasi. Selain itu terjadi pula euforia demokrasi di kalangan masyarakat kita terutama kalangan bawah (*grassroot*) yang belum siap menerima kebebasan demokrasi, setelah selama lebih dari 30 tahun mengalami tekanan (Jw.: *sumpek*). Akibatnya, sedikit saja ada percikan api, maka masyarakat kita yang sudah “basah minyak” cepat sekali terbakar dan menghanguskan sendi-sendi budaya yang selama ini telah tertata dengan baik.

Pendekatan Multikultural

Multikulturalisme tidak terlepas dari berlangsungnya globalisasi dunia. Sebelum istilah globalisasi mencuat dan ramai dibicarakan orang, pandangan para futurolog seperti Alvin Toffler (1970), John Naisbitt dan Patricia Aburdene (1990), dan lain-lain, telah menyadarkan kita bahwa pada akhir abad XX terdapat perubahan besar dalam peradaban umat manusia. Terjadi lompatan besar dalam kemajuan teknologi komunikasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan tata nilai dalam kehidupan secara spektakuler. Televisi (TV) —dan produk teknologi komunikasi lainnya seperti: *video compact disc (VCD)*, *film*, *digital video disc (DVD)*, *home theatre*, dan internet—, menimbulkan akselerasi perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat.

Melalui media massa, berbagai informasi dengan muatan sosial budayanya mengalir dari negara satu ke negara lainnya terutama dari negara maju (Barat) ke negara berkembang termasuk Indonesia. Dunia seolah menjadi perkampungan global (*global village*), antara negara satu dengan lainnya tidak ada lagi sekat-sekat kecuali batas teritorial. Terjadilah transformasi sosial budaya dalam masyarakat kita yang berdampak pada perubahan pemahaman, pandangan, dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan.

Di Indonesia transformasi sosial budaya mengakibatkan terjadinya pergeseran bahkan perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Pola kehidupan masyarakat kita kini sedang berubah dari masyarakat agraris menuju industrial, dari tradisional-statis menuju modern-dinamis, dari nilai lokal menuju nilai global-universal, dari keseragaman menuju keberagaman, dari satu nilai menuju serba nilai, dari monokultural menuju multikultural. Inilah wajah masyarakat kita yang sedang berubah sebagai konsekuensi logis dari berlangsungnya globalisasi.

Fenomena globalisasi yang kemudian melahirkan pluralisme budaya tersebut pada beberapa dekade terakhir ini tampaknya mulai merambah dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Tidak hanya dalam upacara ritual, tradisi keluarga, dan pranata sosial, semangat multikultural mulai menjadi orientasi hidup kalangan masyarakat terutama generasi muda kita. Tak terkecuali spirit multikultural juga terasa dalam karya sastra kita.

Munculnya multikulturalisme dilatarbelakangi antara lain oleh adanya tiga teori sosial yang menjelaskan hubungan antarindividu dalam masyarakat dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Menurut Ricardo L. Garcia (1982: 37-42) teori sosial tersebut adalah: (1) *Melting Pot I: Anglo Conformity* (individu-individu yang beragam latar belakang seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya, disatukan ke dalam satu wadah yang dominan); (2) *Melting Pot II: Ethnic Synthesis* (individu-individu yang beragam latar belakangnya disatukan ke dalam satu wadah baru, identitas agama, etnik, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru; dan (3) *Cultural Pluralism: Mosaic Analogy* (individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis dengan tidak meminggirkan budaya kelompok minoritas). Masyarakat yang warganya berlatar belakang budaya Jawa, Batak, dan Barat misalnya, tiap individu berhak menunjukkan identitas budayanya dan mengembangkannya tanpa saling mengganggu.

Teori ketiga itulah yang dipandang banyak pengamat paling sesuai dengan pengembangan masyarakat global yang pluralistis. Jadi, multikulturalisme mengakui hak individu untuk tetap mengekspresikan identitas budayanya sesuai dengan latar belakang masing-masing, termasuk jender, dengan bebas. Inilah esensi multikulturalisme dalam masyarakat modern yang heterogen.

Meminjam istilah Robinson (dalam Ekstrand, 1997: 350), kita dapat membedakan tiga perspektif dalam pengembangan multikulturalisme, yakni: (1) Perspektif *Cultural Assimilation* (model yang menunjuk pada proses asimilasi warga masyarakat dari berbagai kebudayaan atau masyarakat subnasional ke dalam suatu *core culture* atau *core society*); (2) Perspektif *Cultural Pluralism* (menekankan pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat subnasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing; dan (3) Perspektif *Cultural Synthesis* (sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis, menekankan pentingnya proses terjadinya eksletisisme dan sintesis di dalam diri warga masyarakat, dan terjadinya perubahan dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat subnasional).

Perspektif 'sintesis multikultural' memiliki rasional yang paling mendasar dalam hakikat pengembangan masyarakat multikultural, yang oleh Ekstrand (1997: 349), diidentifikasi dalam tiga tujuan yakni tujuan attitudinal, tujuan kognitif, dan tujuan instruksional.

Dalam situasi sekarang yang disebut antropolog Appadurai (1991: 28) sebagai *global ethnoscapes*, budaya-budaya memang tetap memuat perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak lagi bersifat taksonomis, melainkan interaktif membedakan daripada sebagai sebuah esensi. Perbedaan (seperti halnya persamaan) dapat dipahami ibarat sebuah titik pada seutas tali yang dapat digeser ke kanan atau ke kiri. Terjadilah perubahan cara pan-

dang dalam antropologi, misalnya, *ethnic* (etnik) menjadi *ethnicity* (etnitasitas, kesuku-bangsaan), dari Jawa menjadi ke-Jawa-an, dan seterusnya.

Perbedaan budaya dapat dipahami sebagai suatu keniscayaan, karena hakikatnya dalam masyarakat pasti terdapat individu-individu yang latar belakangnya beraneka ragam. Jadi, pluralisme terdalam akan sampai pada kesepahaman, bahwa perbedaan budaya mengartikulasikan hak-hak orang lain dan inti dari kesatuan dalam perbedaan. Multikulturalisme menciptakan struktur dan proses yang memperbolehkan ekspresi berbagai kebudayaan, komunitas, dan individual baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam konteks ini Dewanto (1991: 25) menyatakan bahwa kita tidak sedang dan hidup dalam aneka dunia yang terpisah satu dengan lainnya, melainkan dalam berbagai dunia yang saling bersentuhan, saling pengaruh, saling memasuki satu dengan lainnya. Karena itu, dunia kita bukanlah dunia yang plural melainkan dunia yang tetap saja tunggal tetapi bersifat multikultural. Pluralitas merupakan tahap awal dari proses ke arah itu, salah satu jalan yang memungkinkan kita untuk toleran dan terbuka untuk memasuki dan dimasuki.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat dikemukakan bahwa multikulturalisme adalah suatu pandangan dan sikap untuk melihat pluralitas budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Sikap seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan menerima dan memahami pluralitas sebagai

keniscayaan hidup. Akhirnya muncul kesadaran bahwa pluralitas dalam realitas dinamik kehidupan adalah realitas bahkan kebutuhan yang tak dapat diingkari.

Adapun pendekatan multikul-tural dalam kajian ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menggunakan matra yang berbasis pada pluralitas budaya dalam kehidupan masyarakat yang memberikan kebebasan kepada berbagai budaya untuk hidup berdampingan dengan saling menghargai satu dengan lainnya. Gagasan dan semangat pluralistik terasa mendasari dalam setiap analisis masalah dan dalam mencari resolusi konflik. Dengan pendekatan demikian diharapkan kultur etnik dan agama, bahkan golongan semuanya dapat berinteraksi secara wajar tanpa harus dipertentangkan, masing-masing memiliki eksistensinya.

Solusi Alternatif Mengeliminasi Konflik: Perspektif Multikultural

Penanganan terhadap konflik dengan pendekatan represif ataupun keamanan (*security approach*) tidaklah tepat, terlebih pada masa pascareformasi. Bahkan, pada masa-masa mendatang penanganan konflik sosial dengan menggunakan senjata sama sekali tidak populer. Karena, di samping sering membawa korban jiwa, juga sering tidak menyelesaikan permasalahan. Misalnya, fenomena yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam beberapa tahun lalu, penyelesaian konflik dengan senjata ternyata justru banyak membawa bencana sosial seperti banyak kekerasan seksual dan/atau pemerkosaan terhadap kaum perempuan oleh oknum militer yang ber-

tugas berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di wilayah serambi Mekkah itu. Perjanjian perdamaianlah yang akhirnya menyelesaikan konflik di provinsi Indonesia paling barat itu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih berorientasi pada pemecahan masalah dengan memerhatikan issue yang melatari konflik.

Lebih lanjut, pendekatan pemecahan masalah memperlakukan konflik sebagai masalah dan bukan sebagai tindak kerusuhan dan kekerasan yang harus dibasmi, terlebih memandangnya sebagai pemberontakan atau makar yang harus diberangus sampai ke akar-akarnya, tanpa melihat akar permasalahan yang sebenarnya. Pendekatan konflik semestinya lebih memfokuskan perhatian bukan hanya pada perilaku konflik melainkan juga rasa tidak puas, rasa diperlakukan tidak adil, dan seterusnya. Juga, pendekatan konflik memfokuskan pada kondisi dan situasi yang melatari konflik yang terjadi. Ringkasnya, pendekatan konflik harus dilakukan secara multidimensi atau dengan pendekatan holistik, di antaranya dengan perspektif multikultural.

Seperti dipaparkan di atas, bahwa pemahaman akan keberadaan pluralitas bangsa kita merupakan tahap awal dari proses ke arah integrasi bangsa. Hal itu merupakan salah satu jalan yang memungkinkan kita untuk toleran dan terbuka untuk memasuki dan dimasuki.

Berpijak pada pemahaman akan adanya pluralitas itu, maka multikulturalisme yang mengedepankan suatu pandangan dan sikap untuk melihat pluralitas budaya sebagai

realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat dapat dijadikan acuan untuk menemukan resolusi konflik antaretnis dan antaragama. Adalah sikap arif jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan menerima dan memahami pluralitas sebagai keniscayaan hidup. Akhirnya muncul kesadaran bahwa pluralitas dalam realitas dinamik kehidupan adalah kenyataan dan kebutuhan yang tak dapat diingkari.

Analisis fenomena konflik dalam masyarakat dilakukan dengan menggunakan matra yang berbasis pada pluralitas budaya dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kita harus dapat memberikan kebebasan kepada berbagai budaya dan agama untuk hidup berdampingan dengan saling menghargai satu dengan lainnya. Gagasan dan semangat pluralistik harus mendasari dalam setiap analisis masalah dan dalam menemukan resolusi konflik. Segenap kultur etnik dan agama, bahkan golongan semuanya dapat berinteraksi secara wajar tanpa harus dipertentangkan, masing-masing memiliki eksistensinya.

Dengan menggunakan pendekatan multikultural maka beberapa langkah solusi alternatif untuk mengeliminasi konflik sosial atau setidaknya meminimalisasi tindak kekerasan sosial terutama antaretnis dan antaragama di Indonesia dapat dilakukan antara lain dengan:

Pertama, perlunya pemahaman dan penerimaan akan adanya pluralitas budaya (*cultural pluralism*) sebagai sebuah realitas dan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini langkah kongkretnya adalah

perlunya advokasi dan gerakan penyadaran atau pencerahan bagi warga masyarakat akan hakikat dan realitas multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan gerakan advokasi tersebut diharapkan setiap individu menyadari bahwa dalam masyarakat terdapat beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Setiap individu dalam komunitas tertentu memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis dengan tidak meminggirkan budaya kelompok minoritas).

Dalam masyarakat yang warganya berlatar belakang budaya Jawa, Batak, Makassar, Betawi, Dayak, dan Barat misalnya, tiap individu berhak menunjukkan identitas budayanya dan mengembangkannya tanpa saling mengganggu. Antara etnis satu dengan lainnya saling menghargai budaya dan agama masing-masing dengan mengabaikan perbedaan dan tanpa adanya tirani mayoritas terhadap minoritas. Dominasi etnik tertentu yang mayoritas terhadap etnik lain yang minoritas perlu dihindari sebab hal itu hanya akan menimbulkan kecemburuan. Kecemburuan itu jika terus berlangsung lama-kelamaan akan dapat melahirkan bibit-bibit konflik yang tidak diinginkan.

Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai pluralitas dalam masyarakat maka akan tercipta iklim kehidupan masyarakat yang kondusif. Dalam arti setiap warga masyarakat menyadari pentingnya saling menghargai budaya dan agama masing-masing. Bahkan, jika iklimnya sudah

demikian kondusif pluralitas budaya itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Sebab, berbagai budaya yang diekspresikan oleh etnik dalam masyarakat itu justru akan memperkaya wawasan dan khasanah kehidupan. Alhasil pluralitas budaya akan melahirkan sebuah keindahan tersendiri bagaikan 'sebuah mozaik yang kaya akan aneka bentuk dan variasi dengan komposisi warna yang estetik'. Dengan demikian individu dalam masyarakat akan merasakan pentingnya keberagaman kultur dalam kehidupan.

Kedua, perlunya pembauran dan integrasi semua etnis dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dalam paradigma multikulturalisme, etnik apa pun tidak dibenarkan merasa sebagai etnik yang paling tinggi di antara etnik yang lain. Atau, tidak dibenarkan adanya dominasi etnik tertentu yang mayoritas terhadap etnik lainnya yang minoritas. Dalam realitas, hampir semua etnik tidak menemui kesulitan untuk melakukan pembauran dalam kegiatan kemasyarakatan itu itu baik etnik Arab, Barat maupun Batak, Bugis, Dayak, Sunda, Betawi dan Jawa dalam masyarakat heterogen. Hanya etnis Cina yang terkadang menghadapi sedikit kendala dalam langkah pembauran itu. Hal ini barangkali tidak terlepas dari sejarah bangsa kita.

Pembauran menyangkut integrasi semua etnik dan warga negara keturunan asing ke dalam masyarakat Indonesia. Namun, karena jumlah terbanyak warga keturunan asing adalah etnis Cina, maka masalah pembauran itu lazimnya dan terutama dikaitkan dengan integrasi WNI etnis

Cina. Selain itu, juga karena pembauran etnis Cina paling menghadapi kendala mengingat adanya faktor-faktor lain di luar faktor ras. Misalnya, faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor agama. Menurut Willmot (1960: 17; lihat Tan, 1963: 92), relasi antara etnis Cina dengan masyarakat pribumi memang masih ditandai dengan kurangnya integrasi dan absennya kesamaan nilai sosial dan kultural. Hal ini berbeda dengan etnis Arab misalnya yang tidak memiliki beban histories. Demikian pula keadaannya dengan etnis Eropa (biasanya mereka disebut Indo-Eropa).

Pembauran etnis Cina, demikian Suryohadiprojo (1987: 219), membawa beban historis yang memperberat usaha mereka secara psikologis untuk berintegrasi dengan rakyat Indonesia. Beban historis *pertama* adalah bahwa sejak dulu orang Cina menganggap dirinya satu-satunya bangsa yang beradab, sedangkan bangsa lain adalah biadab (Barbarian). Memang kebudayaan Cina adalah kebudayaan tertua di dunia —sampai-sampai Nabi Muhammad Saw. pada zaman itu (abad VII M) menyuruh umatnya untuk mencari ilmu hingga ke negeri Cina—. Karena itu, adanya perasaan sebagai etnik tinggi dapat dimengerti. Jadi, karena menilai dirinya paling beradab, maka tidak mudah bagi etnis Cina untuk berintegrasi dengan masyarakat lain yang dipandanginya lebih rendah.

Beban historis *kedua* adalah bahwa etnis Cina pada masa penjajahan diberikan tempat di atas rakyat pribumi oleh pihak penjajah. Jadi, di mata orang Cina, pribumi berada di bawahnya. Realitas ini semakin mem-

perkuat pandangan bahwa etnis Cina merasa dirinya superior terhadap pribumi. Pada masa penjajahan, orang Cina yang diberikan kesempatan menjadi golongan menengah di Indonesia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan membentuk kekuatan ekonomi dan bisnis yang tangguh yang berlanjut hingga kini. Karenanya, perasaan superior etnis Cina diperkuat oleh realitas posisi ekonominya yang lebih kuat.

Di pihak lain, pilihan etnis Cina untuk tetap tinggal di Indonesia pasca-masa penjajahan diterima dengan berbagai macam tanggapan. Bagi orang yang berpendidikan dan rasional, hal itu diterima dengan baik. Sebab dengan begitu masyarakat Indonesia tidak akan kehilangan golongan menengah yang pada masa kemerdekaan sangat sedikit, dan khususnya untuk perdagangan dikuasai oleh etnis Cina. Bagi masyarakat Indonesia yang emosional (umumnya kalangan bawah), mereka menyangsikan kesetiaan etnis Cina kepada Indonesia. Bukankah mayoritas mereka tidak memihak Indonesia dalam menghadapi penjajah Belanda? Bagi mereka, kekuasaan ekonomi Cina justru menjerat perkembangan bangsa Indonesia. Jika kaum emosional itu dapat menggerakkan perasaan rakyat, maka dapat terjadi huru-hara kekerasan sosial yang mengarah kepada penghancuran milik etnis Cina secara besar-besaran. Peristiwa geger Cina awal 1980-an di Solo dan kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Solo dan beberapa kota lain merupakan lembaran buram yang tidak mudah terlupakan.

Berangkat dari berbagai realitas itu, maka kini perlu dikembangkan pembauran dan integrasi antaretnis dalam kegiatan kemasyarakatan guna menuju integrasi nasional yang lebih kokoh. Pembauran dimaksud antara lain dalam bentuk seni budaya. Dalam seni budaya semua etnis dapat mengekspresikan kreasinya masing-masing dengan sikap saling memberi dan menerima. Atau, sebuah kesenian etnis tertentu dapat dipentaskan/dimainkan oleh berbagai etnis. Alangkah indahnya jika kita dapat menyaksikan kethoprak/ wayang orang yang dimainkan oleh mereka dari beragam etnik seperti: Bugis, Dayak, Betawi, Batak, Madura, Jawa, Cina, Arab, dan Eropa misalnya. Demikian pula dalam *ludruk*, *reog*, *jathilan*, dan *tari gambyong* yang merupakan kesenian tradisi Jawa dapat dimainkan oleh etnik Cina, Barat, Batak, Dayak, dan sebagainya.

Dapat pula sebuah seni tradisi Cina, tari Barong Say misalnya dapat dimainkan oleh orang-orang etnis Jawa, Batak, dan Bugis, misalnya. Hal ini pernah dilakukan oleh para etnis Cina yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) di Hotel dan Restoran *Diamond* Solo, beberapa waktu yang lalu (1999) yang asyik dalam permainan wayang orang. Kita menjadi terharu dan merasakan bahwa mereka, keturunan Cina tersebut tidak ada lagi jarak psikologis dari etnis Jawa. Rasanya mereka sudah menjadi bersaudara betul dengan orang Jawa (Jw.: *nyedulur*, *nJawani*). Sebaliknya orang-orang etnis Jawa dapat bergabung dalam permainan *Barong Say* yang berasal

dari Cina itu. Dengan bergabungnya orang-orang Jawa dengan Cina dalam permainan *Barong Say* itu, maka keakraban di antara kedua etnis tersebut sangat terasa, hingga antara keduanya tidak ada lagi jarak psikologis.

Hakikat masalah pembauran etnis Cina adalah masalah Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya. Andaikata orang-orang Indonesia mempunyai kemampuan untuk berfungsi sebagai golongan menengah yang wajar, kehadiran etnis Cina tidak menjadi persoalan yang menimbulkan kebencian dan kekhawatiran. Karena orang Indonesia umumnya merasa bergantung kepada etnis Cina, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran. Jika orang-orang Indonesia mempunyai kemampuan yang memadai sehingga masyarakat kita tidak bergantung kepada etnis Cina, rasa khawatir itu akan hilang dengan sendirinya. Terlebih jika etnis Cina mampu membuktikan kesetiaan mereka kepada Indonesia, seperti yang mereka tunjukkan selama ini dalam meraih prestasi hebat di bidang olah raga badminton, tennis lapangan, dan basket. Jika orang Indonesia mempunyai kemampuan yang memadai, etnis Cina pasti akan melihat dan menyadari hal itu. Mereka tidak akan mengambil sikap superior tanpa merugikan dirinya sendiri. Ini dapat dirasakan mereka yang pernah sekolah, kuliah, dan bekerja bersama. Jika kita dapat menunjukkan kualitas pekerjaan yang tak kalah dari mereka, bahkan melebihi mereka maka menjadi keharusan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat pada umumnya.

Jadi, kunci dalam masalah pembauran antaretnis adalah usaha Indoensia untuk meningkatkan kemampuan rakyat di segala bidang sehingga kita menjadi bangsa yang dihormati dan dihargai oleh siapa pun.

Dalam kondisi demikian, maka semua etnis merasa berkepentingan untuk dapat diterima menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kondisi demikian juga terjadi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Bangsa-bangsa lain yang bermigrasi ke negara-negara itu, seperti Cina, Vietnam, dan Jepang, justru berusaha untuk dapat diterima dalam masyarakat yang didatangi. Hal ini dilakukan karena pihak etnis pendatang menyadari bahwa pihak yang didatangi mempunyai kemampuan yang tinggi. Karena itu, mereka lebih baik menyesuaikan diri dengan pihak yang didatangi.

Ketiga, sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk mampu memanaj berbagai perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik menjadi potensi. Perbedaan pendapat, keyakinan atau agama, terlebih etnis yang berimplikasi pada perbedaan budaya harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sebuah keharusan dalam kerangka mencari kebenaran hakiki. Islam, misalnya, memandang “perbedaan adalah suatu rahmat dalam mencari kebenaran”. Dalam Islam bahkan diajarkan bahwa Muhammad Saw. diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam (*Wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil 'aalamiin*,: “Tidaklah Aku (Allah) mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam”).

Harus disadari, bahwa tanpa adanya perbedaan pendapat, manusia akan dapat terjebak dalam kesalahan terus-menerus, dan tidak akan pernah maju, stagnan, karena tidak ada yang mengkritisi sehingga tidak timbul motivasi. Jadi, budaya kritik harus dibudayakan dalam masyarakat bahkan dalam berbagai kesempatan, termasuk anak-anak di sekolah. Dengan demikian kita akan terbiasa dalam menanggapi/ menyikapi keberbedaan di antara warga masyarakat. Dengan cara ini maka juga akan tercipta suasana demokratis di kalangan masyarakat kita yang multi-etnis, multiagama, dan multikultural.

Keempat, perlunya kemampuan menginterpretasikan dan mengkomunikasikan ajaran agama secara arif. Seperti diketahui, bahwa dimensi penting yang terkandung dalam ajaran agama adalah sebuah sistem simbolik yang membingkai pemeluknya menjalin hubungan secara vertikal sarat nuansa transendental dengan Tuhan (Sang Khalik), yang kadar dan intensitas hubungan itu memiliki implikasi nyata pada kehidupan sosial. Dimensi terpenting dalam sistem simbolik semacam itu adalah ajaran hakikat hidup, yakni pengetahuan tentang dari mana manusia berasal dan ke mana kelak manusia akan kembali.

Di sisi lain, penafsiran tentang ajaran hakikat hidup itu mesti disampaikan dengan hati-hati meski tetap lugas dan jelas, dengan strategi yang tepat dan melalui metode yang sesuai dengan siapa komunikasi yang dihadapi. Jika tidak, maka akan dapat terjadi kesalahpahaman di kalangan umat dalam menerima ajaran agama.

Kesalahpahaman itu bukan tidak mungkin dapat mengakibatkan tindak kekerasan terhadap umat yang berlainan agama yang dipandang sebagai sebuah perjuangan agama (panggilan *Jihad*) untuk menegakkan panji-panji Ilahiah di muka bumi.

Kelima, perlunya sikap keteladanan para pemimpin agama dalam berinteraksi dengan kaum agama lain. Masyarakat Indonesia hingga saat ini masih dikenal paternalistik, yakni mudah mengikuti para tokoh atau pemimpinnya. Jika para pemimpin menunjukkan sikap yang lemah lembut dan menciptakan suasana yang sejuk dalam berinteraksi dengan kaum yang berbeda agama, niscaya umatnya pun akan mengikutinya. Sebaliknya jika para pemimpin agama menunjukkan sikap antipati dan permusuhan dengan kaum yang berbeda agama, maka umat pun tinggal menuruti. Terlebih masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya yang masih memegang falsafah kepemimpinan kepamongan, yakni *Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tutwuri handayani* (di depan dapat memberi contoh, di tengah/ lapangan mau bekerja secara langsung, dan di belakang dapat memberi motivasi), jelas peran keteladanan para tokoh dan/ atau pemimpin agama sangat besar.

Jika kita cermati, kehidupan beragama dan sikap religius merupakan salah satu realitas budaya yang terdapat di seluruh Indonesia. Meskipun sikap religius itu tercermin pada sebagian besar rakyat Indonesia, namun dalam keseharian sikap religius itu memperoleh ekspresi yang

beraneka ragam. Adanya basis kehidupan beragama di Indonesia yang demikian tua dan cukup berkembang, memberikan kemungkinan yang baik bagi rakyat untuk memperkokoh dan memperluas basis itu dalam perkembangan selanjutnya. Landasan spiritual itu merupakan potensi kekuatan mental yang amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, hal itu menjadi modal utama dalam penciptaan suasana yang sejuk, damai, dan sejahtera.

Pertanyaan yang muncul kemudian: Mengapa rakyat Indonesia yang terkenal religius itu kini mudah sekali melakukan tindak kekerasan (anarkisme) yang jelas bertentangan dengan ajaran agama? Mengapa masyarakat Indonesia yang taat dan kuat beragama pun tidak dapat mencerminkan sikap dan perilaku menyejukkan, cinta damai, berbudi pekerti luhur, bersatu dan rukun dengan orang lain, penuh cinta kasih antarsesama sesuai dengan ajaran agamanya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tentu tidak mudah ditemukan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan semua sikap dan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama itu, di antaranya: tidak jarang perilaku pemimpin dan penganut agama sendiri merusak arti dan citra agama. Selain itu, pandangan yang sempit dan fanatisme buta terhadap agama yang dipeluknya sering menimbulkan tindakan destruktif dan anarkis di kalangan agama, yang semuanya itu turut menurunkan nilai agama yang suci murni.

Tindak kekerasan terlebih buh-membunuh antarkaum beraga-

ma, perilaku para penyebar atau pemimpin keagamaan yang memaksakan agama kepada penduduk yang dianggapnya kosong agama, semuanya itu hakikatnya bertentangan dengan ajaran semua agama. Itu semua terjadi karena sikap dan perilaku para pemimpin agama yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya sendiri. Dan, itu pun terjadi di Indonesia, terlebih akhir-akhir ini, yang mengganggu dan merusak sendi-sendi kehidupan beragama yang positif selama ini.

Jika kehidupan agama mampu mendorong terwujudnya sikap dan perilaku yang kondusif, maka kita akan dapat mewujudkan rakyat Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan, sekaligus mampu mewujudkan kehidupan di dunia ini yang lebih indah, sejuk, damai, maju, dan sejahtera. Untuk itu, perlu dikembangkan pola agar para pemimpin agama di Indonesia dapat menjelaskan ajaran-ajaran agama itu untuk menimbulkan sikap dan perilaku manusia Indonesia yang positif. Jadi, persoalannya ada pada para pemimpin dan penyebar agama. Sebab, agama dengan ajaran-ajarannya yang bersumber pada Tuhan memberikan kemungkinan besar untuk penerapan secara positif, dan tidak ada ajaran agama yang negatif.

Dengan kondisi rakyat Indonesia yang religius, lalu para pemimpin keagamaan pandai-pandai menginterpretasikan dan mengkomunikasikan ajaran agama, pasti kita memiliki penduduk yang kuat spiritual dan mentalnya sehingga dapat menjadi potensi besar guna mengantisipasi berbagai tantangan kehidupan termasuk dalam menyikapi berbagai

gejolak yang terjadi dalam kehidupan kebangsaan.

Penutup

Mengakhiri pembahasan resolusi konflik dalam perspektif multikultural, dapat dikemukakan bahwa sebenarnya konflik yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sering mengandung muatan yang kompleks. Muatan politis agaknya paling dominan, di samping masalah kekecewaan dan perasaan ditekan selama ini. Artinya, bermula dari konfigurasi *intersected* kemudian berubah menjadi *consolidated* yang membuka kesadaran konflik dan memungkinkan terjadinya kekerasan kolektif. Adapun dari kacamata budaya politik, berbagai tindak kerusuhan dan tindakan anarkis akhir-akhir ini justru telah disemangati oleh api reformasi yang diterjemahkan secara membabi buta yang terwujud sebagai euforia demokrasi.

Jika dirinci beberapa faktor penyebab timbulnya konflik antaretnik dan antaragama di Indonesia itu antara lain: (1) seberapa jauh tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif kelompok komunal tersebut dibanding dengan kelompok-kelompok lain; (2) ketegasan identitas kelompok; (3) derajat kohesi dan mobilisasi kelompok; dan (4) kontrol

represif oleh kelompok-kelompok dominan.

Beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh antara lain: (1) Perlunya pemahaman dan penerimaan multikulturalisme secara realistis; (2) Langkah pembauran dan integrasi semua etnis dalam kehidupan masyarakat; (3) Memanaj berbagai perbedaan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik menjadi potensi dalam pembangunan bangsa; (4) Peningkatan kemampuan menginterpretasikan dan mengkomunikasikan ajaran agama dengan arif; (5) Pentiungnya sikap keteladanan para pemimpin agama dalam berinteraksi dengan kaum agama lain.

Dengan demikian, untuk meminimalisasi dan mengeliminasi konflik sosial, pendekatan represif atau keamanan tidaklah tepat. Kini lebih diperlukan pendekatan pemecahan masalah, yang melihat konflik dari berbagai aspeknya, termasuk latar belakangnya, issue sentralnya, dan sebagainya. Pendekatan multikultural merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan guna mengeliminasi setidaknya-tidaknya mengurangi konflik sosial yang sering muncul selama ini terutama konflik antaretnis dan antaragama di Indonesia yang masyarakatnya memang multietnis dan multiagama.

Daftar Pustaka

- Appadurai, Arjun. 1991. "Global Ethnoscape: Notes and Quenesfor Transnational Anthropology" dalam *Recapturing Anthropology Working in the Present*. Richard G. Fox (Ed.). Santa Fe, New Mexico: School of American Research Press.

- Dewanto, Nirwan. 1991. "Kebudayaan Indonesia: Pandangan 1991" dalam *Prisma* No. 10 Tahun XX, Oktober 1991.
- Ekstrand, L.H. "Multicultural Education" dalam Saha, Lawrence J. (Eds.). 1997. *International Encyclopedia of the Sociology of Education*. New York: Pergamon.
- Garcia, Ricardo L. 1982. *Teaching in a Pluralistic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher.
- Mas'ud, Mochtar. 1998. "Memahami Kebangsaan". *Makalah* dalam Diskusi "Tantangan terhadap Integrasi bangsa: Studi Kasus Konflik Sosial dan Kerusuhan Massal", Program Pascasarjana UGM Yogyakarta, 1998.
- Naisbitt, John and Aburdene, Patricia. 1990. *Ten New Directions for the 1990's Megatrends 2000*. Megatrends Ltd.
- P3PK-UGM. 1997. "Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu". *Laporan Penelitian P3PK-UGM dengan Departemen Agama RI*, 1997.
- Panggabean, Rizal. 1999. "Strategi Menyelesaikan Konflik Daerah". *Makalah* Diskusi, FISIP dan P3PK-UGM, Yogyakarta, 21 September 1999.
- Susetyawan. 1998. "Kerusuhan Marak Akibat Pertentangan Elite Politik" dalam *Solo Pos*, Tanggal 25 Januari 1999.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. 1987. *Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Tan Giok Lan. 1963. *The Chinese of Sukabumi: A Study of Social and Cultural Accomodation*. Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program.
- Toffler, Alvin. 1987. *Kejutan Masa Depan* (Terj. Sri Koesdiyantinah). Jakarta: PT Pantja Simpati.
- Willmott, D.E. 1960. *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.